

TERBATAS

**OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL GUNA
MEMANTAPKAN KETAHANAN WILAYAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Indonesia yang terletak pada posisi silang lintas internasional antara dua samudera dan dua benua satu sisi akan sangat menguntungkan namun pada sisi lain mempunyai dampak yang cukup merugikan bagi perkembangan Bangsa Indonesia. Ditinjau dari posisi geopolitik dan geostrategi posisi silang tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi tata nilai kehidupan Bangsa Indonesia. Terlebih lagi dengan perkembangan lingkup strategis yang terjadi di dunia dewasa ini dimana menunjukkan kecenderungan situasi yang diwarnai oleh paradigma universal menyangkut isu global berupa demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai salah satu alat pertahanan bangsa, mengemban tugas untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keutuhan wilayah Indonesia khususnya di wilayah daratan. Guna mewujudkan hal tersebut TNI-AD melalui fungsi pembinaan teritorialnya membina potensi geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi suatu kekuatan yang siap untuk melaksanakan operasi perlawanan wilayah. Pembinaan teritorial yang dilaksanakan sebagai upaya dalam mewujudkan daya tangkal dapat memberikan kontribusi penting guna terwujudnya ketahanan wilayah.

c. Kondisi ketahanan wilayah yang tangguh sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.

TERBATAS

Kondisi ini dapat terwujud apabila seluruh aspek yang meliputi bidang geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan hankam dapat berperan sebagai pendukung. Salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh adalah dengan mengoptimalkan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Kewilayahan yang mana pada selanjutnya dengan dilaksanakannya pembinaan teritorial secara optimal dapat berpengaruh positif terhadap ketahanan wilayah.

d. Pada saat ini peran Satuan Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pembinaan teritorial belum dapat terselenggara secara optimal, kondisi ini berdampak pada tingkat ketangguhan wilayah juga menjadi belum optimal. Belum optimalnya pembinaan teritorial dapat diketahui dari adanya indikasi pemberdayaan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial yang belum optimal.

e. Menyikapi hal tersebut di atas, maka sangatlah perlu dilakukan upaya-upaya sebagai langkah untuk memantapkan ketahanan wilayah yang ditandai dengan pemberdayaan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial secara maksimal. Untuk itu perlu dirumuskan masalah "Bagaimana optimalisasi pembinaan teritorial guna memantapkan ketahanan wilayah".

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh satuan Komando Kewilayahan dihadapkan pada potensi wilayah guna memantapkan ketahanan wilayah di darat.

b. **Tujuan.** Agar dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan TNI - AD dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan teritorial yang akan datang sehingga mampu memantapkan ketahanan wilayah di darat.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Penulisan ini dibatasi pada pembahasan tentang optimalisasi pembinaan teritorial pada tingkat Kodim dihadapkan pada potensi geografi, demografi serta kondisi sosial guna memantapkan ketahanan wilayah di darat dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Landasan pemikiran.
- c. Kondisi pembinaan teritorial saat ini.
- d. Faktor yang mempengaruhi.
- e. Kondisi pembinaan teritorial yang diharapkan.
- f. Optimalisasi pembinaan teritorial.
- g. Penutup.

4. Metode Pendekatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan studi kepustakaan.

5. Pengertian-Pengertian.

a. Pembinaan Teritorial TNI-AD. Adalah merupakan kegiatan TNI-AD dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercipta kemandirian TNI-Rakyat untuk didaya gunakan bagi kepentingan pertahanan negara matra darat. ¹⁾

b. Kemandirian TNI. Adalah suatu kondisi dimana benar-benar tercipta adanya perwujudan persatuan sikap dan prilaku hidup secara nyata antara TNI-Rakyat dan Rakyat – TNI. ²⁾

c. Bhakti TNI. Adalah pelibatan TNI sebagai kekuatan pertahanan dalam menjalankan fungsi sosial untuk menunjang

¹⁾ Seskoad, *Bujuk Binter*, hal 2.

²⁾ Seskoad, *Naskah Dep Kemandirian TNI-Rakyat*, hal 2.

pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah tanpa mengabaikan kewaspadaan nasional dan kesiagaan pertahanan negara. ³⁾

d. Pembinaan Ketahanan Wilayah. Adalah segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah. ⁴⁾

e. Sistem Pertahanan Negara. Adalah sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. ⁵⁾

f. Komunikasi Sosial. Adalah cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI –AD yang berhubungan dengan perencanaan, kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan keeratn hubungan dengan segenap komponen bangsa guna mewujudkan saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pertahanan. ⁶⁾

³⁾ Puster, *Bujuknik ttg Bakti TNI*, Th 2004, hal 5.

⁴⁾ Seskoad, *Kemanunggalan TNI-Rakyat*, Th 2003, hal 3

⁵⁾ Ibid., hal 4.

⁶⁾ Puster, *Bujuknik Komunikasi Sosial*, Th 2002, hal 3.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum.

a. Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang dikumandangkan pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 diperoleh melalui perjuangan melawan penjajah Belanda maupun Jepang. Perjuangan yang dilaksanakan dalam kurun waktu cukup lama tidak terlepas dari peran dan dukungan rakyat Indonesia, begitu juga dalam perang mempertahankan kemerdekaan perjuangan kegigihan yang ditunjukkan oleh segenap rakyat yang dilaksanakan bahu membahu dengan laskar ketentaraan serta kekuatan angkatan perang Indonesia yang baru terbentuk menunjukkan sumbangsih yang tidak kecil. Berdasarkan hasil perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan kemampuan angkatan perang dengan dukungan rakyat yang begitu besar merupakan kekuatan sendiri yang menjadi tulang punggung perjuangan.

b. Pada perkembangan selanjutnya TNI khususnya TNI-AD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mempertahankan kedaulatan serta integritas bangsa pada matra darat tidak bisa terlepas dari peran serta dukungan rakyat dalam pelaksanaan tugasnya, "Roh" nya TNI-AD adalah kemanunggalannya dengan rakyat, tanpa dukungan rakyat TNI-AD tidak berarti apa-apa.⁷⁾

c. Mencermati pelaksanaan pembinaan teritorial ke depan guna memantapkan ketahanan wilayah, Satuan Komando Kewilayahan harus mampu mewujudkan potensi wilayah menjadi kesiapan wilayah guna menghadapi berbagai ancaman dengan memberdayakan potensi geografi, demografi serta kondisi sosial sehingga tercapai dan terpeliharanya stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁷⁾ Rymyzar Ryachudu, *Visi, Misi dan Binter TNI-AD*, hal 13.

7. Landasan Idiil Pancasila. Pandangan hidup suatu bangsa merupakan pedoman dalam memandang suatu persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa tersebut yang selanjutnya dapat ditentukan arah dan cara penyelesaian persoalan tersebut secara tepat. Dengan adanya pandangan hidup yang jelas suatu bangsa tidak akan terombang-ambing sebagai akibat dari timbulnya berbagai persoalan baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dengan masyarakat bangsa lain di dunia. Dalam pandangan terkandung terkandung arah kehidupan yang membawa masyarakatnya kearah kehidupan yang lebih baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memperoleh dukungan rakyat Indonesia karena sila-silanya.⁸⁾ Karena sila-sila tersebut merupakan cermin dari sikap dan perilaku dari seluruh rakyat Indonesia yang berakar dari budaya serta nilai nilai luhur bangsa yang dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu Pancasila tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain.⁹⁾

8. Landasan Konstitusional UUD 45. UUD 45 dalam kemurnian pelaksanaannya sesuai termaktub dalam pembukaan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".¹⁰⁾ Dalam pelaksanaannya merupakan upaya dari bangsa Indonesia untuk melindungi integritas serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana Bangsa Indonesia tidak mungkin lari dan surut dari pendiriannya, tak mengenal menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman terhadap in tegritas dan kedaulatan bangsa mengandung arti bahwa kepada setiap warga negara dituntut kepeduliannya untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan bela negara, persatuan dan kesatuan manakala negara terancam.

⁸⁾ Seskoad, *Pancasila*, Th 2003 hal 22.

⁹⁾ *Ibid.*, hal 22.

¹⁰⁾ Seskoad, *UUD 45*, Th 2003, hal 11.

9. Landasan Konsepsional.

a. **Wawasan Nusantara.** Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang Bangsa Indonesia yang manifestasinya ditentukan oleh kondisi dinamis Bangsa Indonesia dengan latar belakang kesejahteraan, letak dan bentuk geografi maupun keadaan yang serba subyektif kultural berdasarkan Pancasila dan UUD 45 sebagai aspirasi dan eksistensi Bangsa Indonesia merdeka, berdaulat, kokoh, bersatu sehingga memiliki ciri tersendiri sebagaimana menjiwai Bangsa Indonesai dalam segala tindak kebijaksanaannya.¹¹⁾ Dalam hal ini penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat mengacu pada corak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindaknya selalu mengutamakan kesatuan dan persatuan. Cara pandang ini mendorong aspirasi Bangsa Indonesia dalam satu kesatuan wadah dan sarana perjuangan bangsa yang utuh, bulat termasuk kedalamnya kesatuan pertahanan dan keamanan. Perwujudan kesatuan pertahanan keamanan mengandung makna bahwa ancaman terhadap kedaulatan nasional secara keseluruhan harus dihadapi dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan Bangsa Indonesia.

b. **Ketahanan Nasional.** Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 45 serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional Indonesia.¹²⁾ Berkaitan dengan hal tersebut maka Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka berdaulat senantiasa mempersiapkan diri, siap sedia serta waspada mengantisipasi timbulnya ancaman dengan memantapkan daya tangkal di setiap daerah.

¹¹⁾ Seskoad, *Wawasan Nusantara*, Th 2003 hal 6

¹²⁾ Seskoad, *Ketahanan Nasional*, Th 2003 hal 3

10. Landasan Operasional.

a. **Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Disebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dengan demikian tanggung jawab dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas bangsa merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia yang mana penyiapannya dilakukan secara terpadu bersama-sama masyarakat dengan pemerintah.

b. **Doktrin Kartika Eka Paksi.** Disebutkan bahwa fungsi-fungsi TNI-AD khususnya didalam fungsi organik militer mencantumkan fungsi teritorial sebagai salah satu fungsi organik¹³. Dengan demikian pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh satuan Komando Kewilayahan secara legal formal memiliki kekuatan hukum yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai pembina wilayah dalam mewujudkan terciptanya ketahanan wilayah.

c. **Undang-Undang TNI No. 34 Pasal 7 tahun 2004.** Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut TNI tidak bisa terlepas dari pentingnya dukungan rakyat terutama dalam membangun pertahanan di wilayah yang melibatkan unsur geografi, demografi serta kondisi sosial.

¹³⁾ Mabes TNI-AD, *Doktrin TNI-AD "KARTIKA EKA PAKSI" MABESAD*, hal 24.

d. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pemberlakuan otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah membangkitkan minat serta memacu masyarakat untuk membangun daerahnya dengan mengoptimalkan potensi wilayah yang dimiliki, kondisi seperti ini sangat mendukung terhadap pewujudan konsep pertahanan sistem pertahanan semesta yang mana dalam konsep tersebut sangat diperlukan kemampuan untuk mengelola potensi wilayah yang selanjutnya dapat diarahkan untuk mewujudkan daerah pangkal perlawanan serta ketahanan wilayah.

BAB III

PEMBINAAN TERITORIAL SAAT INI

11. Umum. Bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi perkembangan dunia Internasional saat ini sangatlah perlu waspada dalam menghadapi berbagai kemungkinan terhadap ancaman yang timbul, salah satu ancaman yang perlu menjadi perhatian khusus adalah perang dengan bentuk lain yang diterapkan oleh negara agresor. Melalui konsepsi pertahanan bangsa Indonesia Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara serta sumber daya nasional diharapkan akan mampu menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang timbul. Guna mendukung konsep sistem pertahanan semesta perlu diwujudkan kesiapan wilayah. Untuk mewujudkan kesiapan tersebut diperlukan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, namun demikian dalam pelaksanaan pembinaan teritorial secara kongkrit dilapangan masih terdapat banyak kendala sehingga pembinaan teritorial dalam menyiapkan potensi wilayah menjadi kesiapan wilayah dalam mendukung ketahanan wilayah belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam memberdayakan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial.

12. Pembinaan Geografi. Pelaksanaan pembinaan teritorial pada bidang Geografi yang belum optimal terlihat belum adanya kesiapan dalam mendukung terciptanya ketahanan wilayah seperti halnya sebagaimana berikut :

- a. Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran pembinaan teritorial di lapangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RUTR antara pemerintah daerah dengan Satuan Komando Kewilayahan belum berjalan dengan baik yang mana penyusunan RUTR pembangunan daerah lebih cenderung pada pendekatan kesejahteraan tanpa memandang pada pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan.
- c. Penentuan Daerah Pangkal Perlawanan dan Kalsifikasi Daerah belum dapat diwujudkan secara nyata baik batas wilayah maupun fasilitas pendukungnya.

13. Pembinaan Demografi. Pelaksanaan pembinan teritorial pada bidang Demografi terlihat dari masih belum adanya kesiapan dari masyarakat dalam mendukung terciptanya ketahanan wilayah.

- a. Belum dilaksanakannya inventarisasi potensi masyarakat di wilayah secara aktual sesuai tingkat profesi serta kemampuan lainnya guna kesiapan penggunaan sewaktu-waktu waktu serta kebutuhan mobilisasi.
- b. Menipisnya jiwa Bela Negara serta militansi pada masyarakat berakibat pada semakin berkurangnya patriotisme dan nasionalisme masyarakat terhadap bangsa.
- c. Kemampuan serta penyediaan tenaga ratih masih sangat terbatas sekali hal tersebut berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat dalam mendukung ketahanan wilayah menjadi sangat kurang.

14. Pembinaan Kondisi Sosial. Terciptanya kondisi sosial yang kondusif serta stabil merupakan persyaratan bagi keberhasilan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan pembinaan teritorial serta terbatasnya kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat berpengaruh terhadap kurangnya kontribusi potensi kondisi sosial dalam membentuk daya tangkal terhadap kemungkinan ancaman yang muncul, seperti beberapa hal berikut ini.

a. Bidang Idiologi. Masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang menganut faham fundamentalis yang bertentangan dengan Pancasila.

b. Bidang Politik.

1) Menurunnya semangat persatuan dan kesatuan dari sebagian masyarakat karena lebih mengutamakan kepentingan aspirasi kelompok politiknya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan politik dengan melibatkan masyarakat sebagai pendukungnya yang menyebabkan timbulnya tindakan anarkis.

2) Munculnya peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan hukum dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada perencanaan pembangunan tidak mendukung pada konsep pertahanan sistem pertahanan semesta.

3) Munculnya semangat kedaerahan yang berlebihan di masyarakat sehingga mengaburkan semangat nasionalisme yang sangat diperlukan dalam membentuk ketahanan masyarakat.

c. Bidang Ekonomi. Keterbatasan pembinaan teritorial dalam membuka peluang usaha ekonomi bagi masyarakat mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja serta lemahnya kemampuan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

d. Bidang Sosial Budaya. Kondisi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat terbuka serta pesatnya kemajuan teknologi telah banyak mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi tersebut pelaksanaan pembinaan teritorial yang masih sarat dengan keterbatasan kemampuan serta sarana prasarana belum mampu mewujudkan kondisi sosial budaya yang diharapkan seperti yang terlihat berikut ini :

- 1) Terlihat semakin banyak masyarakat yang cenderung bersifat individualisme dan materialisme sehingga sifat gotong-royong semakin ditinggalkan.
- 2) Masuknya budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap mentalitas serta moral masyarakat telah sampai ke pelosok pedesaan.
- 3) Kurangnya perhatian terhadap sanitasi serta kebersihan oleh masyarakat memicu terjadinya degradasi kesehatan masyarakat terutama kesehatan para ibu dan anak, yang menyebabkan ketahanan masyarakat menjadi sangat berkurang.

e. Kondisi Hankam. Kurangnya pembinaan dalam masalah penyuluhan hukum kepada masyarakat telah mempengaruhi pada tingginya tingkat tindak pelanggaran hukum. Menyikapi hal tersebut saat ini terindikasi adanya hal-hal yang dapat merusak ikatan persatuan dan kesatuan serta stabilitas keamanan seperti terlihat sebagai berikut :

- 1) Terjadinya konflik antar penduduk yang disebabkan adanya sentimen perbedaan suku dan agama di beberapa tempat yang menciptakan situasi tidak kondusif serta kerawanan keamanan.
- 2) Masih tingginya tingkat kriminalitas serta tindakan anarkis yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan di wilayah.

- 3) Kurang pedulinya masyarakat terhadap kerawanan yang timbul termasuk lapor cepat mengakibatkan penanganan terhadap pelanggaran hukum serta Kamtibmas tidak efektif.

BAB IV

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

15. Umum. Untuk dapat menangkal serta mempertahankan segala macam bentuk ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh potensi bangsa serta sumber daya nasional secara total dan integral. Untuk mendukung sistem pertahanan tersebut haruslah dapat terwujud ketahanan wilayah yang tangguh. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penataan unsur geografi, demografi serta kondisi sosial sehingga mampu memberikan keuntungan strategis baik dari aspek pertahanan maupun kesejahteraan. Guna mewujudkan ketahanan wilayah tersebut, satuan kewilayahan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan teritorial berupaya mewujudkan kesiapan wilayah. Namun demikian untuk mewujudkan kesiapan wilayah tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan teritorial baik faktor dari luar ataupun faktor dari dalam, selain itu masih ditemukan berbagai kelemahan dan kendala sehingga dalam pembinaan teritorial perlunya dukungan dari berbagai pihak.

16. Faktor Internal.

a. Kekuatan.

- 1) Kemanunggalan TNI dengan rakyat yang sudah terbentuk sejak perjuangan kemerdekaan telah terbukti mampu secara efektif dan teruji mengatasi segala permasalahan dan gejolak bangsa sehingga terbentuk semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa.

2) Satuan Komando kewilayahan sebagai pelaksana tugas pembinaan teritorial telah tergelar dengan segala kemampuannya untuk terus melaksanakan tugas pembinaan teritorial dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dan membentuk ketahanan wilayah.

3) Tingkat disiplin dari prajurit teritorial dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak ringan.

4) Jiwa korsa serta kebersamaan dari aparat teritorial dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial mampu meningkatkan motivasi dan semangat dalam menjalankan tugas di lapangan.

b. Kelemahan.

1) Terbatasnya sarana dan prasarana bagi aparat teritorial terutama dalam menunjang pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah binaan.

2) Kesejahteraan aparat teritorial yang masih rendah serta belum mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupan keluarga mengakibatkan adanya upaya-upaya untuk mencari tambahan diluar gaji yang diterima.

3) Tingkat profesionalisme aparat teritorial yang masih terbatas terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat akademis serta terbatasnya kemampuan dalam mengkomunikasikan kepentingan institusi TNI dengan pemerintah daerah dan legislatif.

17. Faktor Eksternal.

a. Peluang.

5) Kemampuan Pemerintah saat ini yang mampu menciptakan situasi politik yang kondusif memberikan peluang terlaksananya pembinaan teritorial secara menyeluruh di wilayah pelosok tanah air.

6) Konsep sistem pertahanan semesta yang menjadikan pedoman bagi penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan dalam menangkal berbagai ancaman, yang mana dalam penyiapan tersebut tidak terlepas dari peran pembinaan teritorial.

7) Adanya respon positif terhadap pelaksanaan pembinaan teritorial dari beberapa daerah yang telah memberlakukan otonomi daerah dengan memberikan dukungan fasilitas transportasi bagi prajurit teritorial dalam melaksanakan tugas pembinaan wilayah.

b. Kendala.

1) Masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat yang menuntut agar Komando Kewilayahan dibubarkan sebagai akibat dari pelaksanaan pembinaan teritorial yang menghambat kepentingannya.

2) Terjadinya penurunan aktualisasi terhadap nilai-nilai kejuangan pada sebagian masyarakat sebagai akibat dari masuknya budaya asing yang tidak terkontrol.

3) Terjadinya perubahan nilai-nilai dan norma pada sebagian masyarakat yang cenderung berfikir dan bertindak secara pragmatis jangka pendek tanpa memikirkan kepentingan umum untuk jangka panjang.

BAB V

PEMBINAAN TERITORIAL YANG DIHARAPKAN

18. Umum. Terciptanya ketahanan wilayah sebagai syarat untuk mewujudkan ketahanan nasional yang nantinya dapat mempengaruhi terhadap terwujudnya integritas bangsa serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, haruslah mendapat dukungan dari segenap komponen bangsa. Kondisi tersebut dapat tercipta apabila kesadaran berbangsa dan bernegara telah dimiliki oleh seluruh insan anak bangsa sebagai pelaku dalam menegakkan kedaulatan dan integritas bangsa. Sejalan dengan penyiapan potensi wilayah dalam mewujudkan ketahanan wilayah Satuan Kewilayahan melalui pelaksanaan pembinaan teritorialnya diharapkan mampu melaksanakan perannya guna memberdayakan potensi wilayah yang ada menjadi kekuatan pertahanan wilayah yang mampu menangkal dan menghadapi ancaman sekaligus menciptakan kondisi bangsa yang memiliki daya tangkal serta mampu menghadapi dinamika dalam kehidupan masyarakat.

19. Pembinaan Geografi.

- a. Penentuan obyek yang akan dijadikan sasaran pembinaan teritorial di lapangan harus sudah jelas, terprogram serta dikoordinasikan dengan instansi terkait baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal meliputi aspek kesejahteraan dan stabilitas daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RUTR antara pemerintah daerah dengan Satuan Komando Kewilayahan dapat saling mendukung serta adanya kesinkronan meskipun dibuat dengan kepentingan serta pandangan yang berbeda yang mana penyusunan RUTR pembangunan daerah lebih cenderung pada pendekatan kesejahteraan sedang RUTR yang dibuat oleh Komando kewilayahan cenderung pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan.

- c. Penentuan Daerah Pangkal Perlawanan dan Klasifikasi Daerah dapat terwujudkan secara nyata baik kualitas, batas wilayah serta maupun fasilitas pendukungnya.

20. Pembinaan Demografi. Pelaksanaan pembinaan pada bidang Demografi diharapkan dapat membentuk kesiapan masyarakat dalam mendukung terciptanya ketahanan wilayah serta tersedianya data aktual masyarakat guna mendukung terlaksananya pembinaan teritorial di wilayah.

- a. Tersedianya data potensi masyarakat di wilayah secara aktual sesuai tingkat profesi serta kemampuan lainnya guna kebutuhan sewaktu-waktu serta mobilisasi sesuai kebutuhan.
- b. Adanya kesadaran Bela Negara pada masyarakat sehingga membentuk kekuatan serta militansi dan patriotisme sebagai kekuatan perlawanan rakyat.
- c. Kemampuan tenaga raih dapat meningkat serta terperlihara dengan baik, penyediaan tenaga raih tersedia secara optimal ditiap wilayah serta keberadaannya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendukung terciptanya kesiapan serta ketahanan wilayah.

21. Pembinaan Kondisi Sosial. Terciptanya kondisi sosial yang kondusif serta stabil merupakan persyaratan bagi keberhasilan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan pembinaan teritorial serta terbatasnya kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat berpengaruh terhadap kurangnya kontribusi potensi kondisi sosial dalam membentuk daya tangkal terhadap kemungkinan ancaman yang muncul, seperti beberapa hal berikut ini.

- a. **Bidang Idiologi.** Semakin mantapnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila yang merupakan tuntunan sikap dan prilaku serta

pandangan hidup bagi seluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia serta tidak adanya sikap fanatisme yang berlebihan terhadap ajaran tertentu.

b. Bidang Politik.

1) Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat serta penyaluran aspirasi politik pada tatanan hukum yang berlaku dengan mengutamakan ikatan persatuan dan kesatuan antar masyarakat.

2) Tersusunnya Peraturan Daerah yang masih menjiwai serta mendasari pada ketentuan hukum dari pemerintah pusat sehingga mendukung terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang dapat mewujudkan ketahanan wilayah.

3) Terwujudnya semangat kedaerahan yang berintegrasi dengan masyarakat daerah lainnya dalam pelaksanaan pembangunan sehingga meningkatnya semangat nasionalisme yang sangat diperlukan dalam membentuk ketahanan masyarakat.

c. Bidang Ekonomi. Mampu untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam meningkatkan ekonomi serta taraf hidup masyarakat.

d. Bidang Sosial Budaya. Kondisi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat terbuka serta pesatnya kemajuan teknologi banyak mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi tersebut pelaksanaan pembinaan teritorial yang masih sarat dengan keterbatasan kemampuan serta sarana prasarana diharapkan mampu mewujudkan kondisi sosial budaya seperti yang terlihat berikut ini :

1) Terbentuknya kesetiakawanan sosial, gotong royong, senasib sepenanggungan serta persatuan antar seluruh masyarakat sehingga tercipta kebersamaan dalam membentuk ketahanan wilayah.

2) Masyarakat mampu menangkal masuknya budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap mentalitas serta moral masyarakat.

- 3) Terwujudnya lingkungan yang sehat pada masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kesehatan terutama pada kesehatan ibu dan anak.

e. Kondisi Hankam. Dengan dilaksanakannya pelaksanaan pembinaan teritorial dalam hal peningkatan keamanan diharapkan dapat menciptakan kondisi sebagai berikut:

- 1) Terjalannya ikatan kebersamaan antar masyarakat terutama dalam jalinan ikatan sosial yang dapat menjauhkan terhadap terjadinya konflik yang disebabkan oleh adanya sentimen perbedaan suku dan agama dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
- 2) Mampu menekan tindakan kriminalitas serta tindakan anarkis sehingga dapat mewujudkan situasi yang kondusif serta terjaminnya stabilitas keamanan di wilayah.
- 3) Dapat membentuk kepekaan masyarakat terhadap kerawanan yang timbul termasuk lapor cepat sehingga dapat mendukung penanganan terhadap pelanggaran hukum serta Kamtibmas secara efisien.

BAB VI

OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL

22. Umum. Memahami pentingnya optimalisasi pembinaan teritorial guna memantapkan ketahanan wilayah di darat, maka berbagai kelemahan serta kendala harus dapat dicarikan solusi pemecahan serta dieleminir. Selanjutnya peluang dan kekuatan yang ada harus dapat dimanfaatkan agar pembinaan teritorial dapat mengoptimalkan perannya guna memantapkan ketahanan wilayah. Upaya-upaya yang dilakukan tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai.

23. Tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dari upaya ini adalah mewujudkan pembinaan teritorial secara optimal guna memantapkan ketahanan wilayah di darat agar dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas TNI-AD sehingga tercapai Ketahanan Wilayah.

24. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya ini adalah :

- a. Meningkatnya kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
- b. Meningkatnya kualitas daerah sebagai daerah pangkal perlawanan.
- c. Terbentuknya klasifikasi daerah untuk menunjang kekuatan wilayah bagi kepentingan pertahanan.
- d. Tersedianya kekuatan perlawanan rakyat secara efektif.
- e. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi bela negara oleh rakyat.
- f. Meningkatnya kemandirian TNI dengan Rakyat.
- g. Meningkatnya ketahanan wilayah dibidang kondisi sosial.

25. Subyek. Subyek dalam mengoptimalkan pembinaan teritorial guna memantapkan ketahanan wilayah di darat sesuai kewenangan adalah :

a. Kasad. Sebagai pembantu dan pelaksana utama Panglima TNI, Kasad berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- 1) Menjabarkan pokok-pokok kebijaksanaan dan strategi pembinaan teritorial sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Menentukan kebijaksanaan tentang pengembangan kemampuan, kekuatan dan gelar TNI-AD.

3) Menyelenggarakan pembinaan administrasi, teknis dan kemampuan pembinaan teritorial.

b. Pangdam.

1) Pangdam bertanggung jawab membuat kebijaksanaan di tingkat Kotama dalam menyelenggarakan pembinaann teritorial serta kodal dalam rangka pembinaan kemampuan dan kekuatan satuan dalam jajarannya.

2) Menyusun program pelaksanaan pembinaan teritorial sesuai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Komando Atas yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan pembinaan.

3) Melaporkan hasil pembinaannya kepada Komando Atas.

c. Danrem.

1) Menyelenggarakan pembinaan teritorial sesuai dengan lingkup tanggung-jawabnya.

2) Menyusun program pembinaan teritorial untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di jajarannya.

3) Melaporkan hasil pembinaannya kepada Komando Atas.

26. Obyek. Obyek dalam Optimalisasi pembinaan teritorial ini adalah potensi Geografi, Demografi serta Kondisi Sosial pada tingkat satuan Kodim.

27. Metode.

a. Bhakti TNI. Dengan mendayagunakan kemampuan TNI sebagai kekuatan pertahanan dalam menjalankan fungsi sosial untuk menunjang pembangunan sosial tanpa mengabaikan kewaspadaan. Dalam pelaksanaannya bhakti TNI meliputi bidang-bidang :

1) Bidang fisik materiil, dilaksanakan dengan pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana melalui :

a) Karya bhakti, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara perorangan atau satuan.

b) Operasi bhakti, sebagai tugas yang dilaksanakan atas perintah dan dibatasi ruang dan waktu.

2) Bidang mental spiritual, dilaksanakan dengan Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial (KKS) untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan wilayah.

b. Pembinaan Ketahanan Wilayah. Pembinaan ketahanan wilayah mengutamakan pendekatan keamanan untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang dinamis serta meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menanggulangi ancaman atau gangguan yang timbul. Pada pelaksanaan Bintahwil menggunakan pendekatan Bahkti TNI dan Komsos dengan mengedepankan :

1) Persuasif adalah cara untuk menggugah kesadaran warga negara untuk ikut serta dalam membangun ketahanan wilayah sesuai dengan bidang profesi masing-masing.

2) Pragmatif, adalah cara untuk menggugah kesadaran warga negara dalam mendukung terwujudnya ketahanan wilayah melalui kegiatan nyata dilapangan.

3) Komunikatif, adalah cara untuk menggugah kesadaran warga negara dalam mendukung terwujudnya ketahanan wilayah melalui pendekatan dialog dengan segenap lapisan masyarakat.

c. Pembinaan Komunikasi Sosial. Pembinaan komunikasi sosial mengutamakan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna mewujudkan saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan wilayah. Dalam melaksanakan Komunikasi

Sosial disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sert obyek sasaran yang telah ditentukan, bentuk yang dapat digunakan adalah :

- 1) Diskusi.
- 2) Dialog.
- 3) Penyampaian pesan melalui media olah-raga dan seni.

28. Sarana dan Prasarana.

a. Peranti lunak. Buku-buku petunjuk pembinaan teritorial yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah.

b. Peranti keras. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi serta sarana penunjang lainnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teritorial terutama pada pembinaan wilayah meliputi wilayah yang cukup luas serta terselenggaranya komunikasi dalam mendukung sistem pelaporan.

29. Upaya yang Dilaksanakan. Upaya pemecahan masalah pembinaan teritorial yang belum optimal diarahkan untuk mengatasi kurang siapnya penyiapan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah yang berdampak pada lemahnya daya tangkal pada bidang geografi, demografi serta kondisi sosial sebagai unsur utama terwujudnya ketahanan wilayah dalam mendukung terselenggaranya sistem pertahanan semesta. Melalui metode Bhakti TNI yang meliputi bidang fisik matriil dan mental spirituil, pembinaan ketahanan wilayah serta komunikasi sosial, dilaksanakan upaya pengoptimalan pembinaan teritorial pada bidang geografi, demografi dan kondisi sosial guna memantapkan ketahanan wilayah meliputi :

a. **Bidang Geografi.**

1) Dalam penentuan sasaran pembinaan teritorial di bidang geografi harus dapat mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan stabilitas daerah dilaksanakan dengan komunikatif, pendataan serta identifikasi masalah dan mencari daerah sasaran sesuai rencana pembangunan daerah melalui proses “ bottom up” yang dilaksanakan dengan proses perumusan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa sampai dengan kecamatan dan kabupaten yang memenuhi aspek kesejahteraan dan bermanfaat untuk pertahanan negara dengan kriteria sebagai berikut:

a) Kriteria dari aspek kesejahteraan :

- (1) Merupakan desa kritis, yang memiliki sifat khusus dengan indikator daerah banjir dan kekeringan.
- (2) Daerah terpencil dan terisolir.
- (3) Daerah miskin dimana kehidupan ekonomi rakyat jauh dari cukup.
- (4) Daerah terbelakang dimana kondisi rakyatnya dibawah rata-rata dari Desa lainnya.
- (5) Daerah yang terkena bencana alam.

b) Kriteria dari aspek stabilitas daerah.

- (1) Rawan dari segi ideologi, politik ekonomi dan sosial budaya:
 - (a) Rawan terhadap kemungkinan berkembangnya pengaruh ideologi komunis.
 - (b) Sering adanya kegiatan yang mendiskreditkan pemerintah.

TERBATAS

25

(c) Berkembangnya aliran keparcyaan yang dilarang pemerintah.

(2) Rawan dari segi stabilitas keamanan.

(a) Daerah yang sering terjadi perampokan.

(b) Daerah yang rakyatnya banyak antipati terhadap TNI sebagai akibat hasutan pihak lain.

(c) Daerah yang akan menjadi ancaman dimasa mendatang (daerah yang dijadikan tempat persembunyian GPK/Sparatis).

2) Guna mendapatkan penyesuaian dalam penyusunan RUTR pembangunan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan RUTR pertahanan yang disusun oleh Satuan Komando Kewilayahan maka dilaksanakan Komunikasi Sosial melalui diskusi, komunikatif serta dialogis yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dengan memberikan masukan, saran dalam Rakorbangda serta koordinasi secara terus menerus dengan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyusunan RUTR pembangunan daerah maupun pertahanan wilayah.

3) Agar penentuan daerah pangkal perlawanan serta kalsifikasi daerah dapat terwujud secara nyata melalui, Bhakti TNI dengan kegiatan fisik berupa pendataan dan pembangunan sarana prasarana serta kegiatan non fisik berupa penyuluhan, penerangan dan pelatihan guna memperbaiki lingkungan ataupun pembangunan sarana daerah dan Komunikasi Sosial melalui Pragmatif dan komunikatif dengan melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna penyusunan rencana pembangunan daerah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan Daerah Pangkal Perlawanan serta Kalsifikasi Daerah yang dikaitkan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

TERBATAS

TERBATAS

26

- a) Peluang mobilitas, konsentrasi dan dekonstruksi kekuatan TNI.
- b) Peluang pemusatan dan penyebaran logistik meliputi:
 - (1) Mengkaji terus menerus nilai manfaat dari perkembangan faktor SDA/Geografi untuk kepentingan kegiatan logistik wilayah.
 - (2) Menyusun konsep pemanfaatan aspek SDA/Geografi untuk mendukung terwujudnya dukungan logistik daerah.
- c) Pembentukan dan memelihara kualitas Daerah Pangkal Perlawanan melalui pembangunan sarpras serta KKS.
 - (1) Penentuan rencana berbagai kemungkinan lokasi daerah pangkal perlawanan yang ideal termasuk daerah cadangannya dengan mengembangkan 5 aspek medan.
 - (2) Menentukan sarana komunikasi dan peringatan dini serta alat bantu navigasi lainnya.
 - (3) Mengidentifikasi dan menyiapkan, fasilitas, jalan pendekat serta sistem transportasi.
 - (4) Mendata potensi logistik yang tersedia di wilayah kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan dukungan operasi serta cara penyiapannya.
 - (5) Menyeleksi terhadap persediaan logistik sesuai kebutuhan di daerah.

TERBATAS

d) Pembentukan dan memelihara kualitas Klasifikasi Daerah dilaksanakan dengan pendataan :

(1) Daerah depan. Pada dasarnya daerah depan ditata berdasarkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat menguntungkan dalam menghambat gerak maju musuh, penentuan daerah depan ini pembangunan tidak terlepas syarat-syarat 5 aspek medan.

(2) Daerah komunikasi. Daerah komunikasi ini disiapkan sebagai daerah penghubung antara daerah pertempuran dan daerah belakang. Dalam penentuan daerah komunikasi, selain memenuhi syarat-syarat 5 aspek medan juga perlu disiapkan serta pembangunan:

(a) Jalan-jalan pendekat yang relatif aman menuju daerah depan.

(b) Lokasi untuk penimbunan sementara dukungan logistik.

(c) Sarana transportasi untuk pengangkutan logistik dari daerah belakang menuju daerah depan.

(3) Daerah belakang. Pada dasarnya daerah ini disiapkan sebagai daerah pangkal pertahanan akhir dalam menghambat dan menghancurkan musuh.

Penyiapan daerah belakang meliputi :

(a) Menentukan daerah yang akan digunakan sebagai garis hambat.

(b) Menentukan daerah penyiapan dukungan logistik.

(c) Menentukan jalan-jalan pendekat yang dapat dilalui untuk pengunduran.

b. Bidang Demografi.

1) Guna memperoleh data aktual potensi masyarakat sesuai profesi dan kemampuannya dilaksanakan pendataan dan inventarisasi melalui Komunikatif serta Pragmatif dengan upaya:

- a) Mendata jumlah tenaga kerja yang dapat dikembangkan dan didaya gunakan untuk kepentingan pertahanan.
- b) Mendata profesi serta kemampuan masyarakat sesuai bidangnya.
- c) Memperbarui data dan menginventarisir secara aktual setiap perubahan tenaga kerja serta profesi yang tersedia.

2) Pendidikan Bela Negara kepada masyarakat dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan melalui komunikatif, dengan upaya pemberian materi pendidikan bela negara:

a) Cinta tanah air, upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dilaksanakan melalui kegiatan terpadu di setiap strata baik penyuluhan maupun praktek diwujudkan dalam:

- (1) Kesadaran guna melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tanggap dan waspada terhadap kemungkinan ancaman yang dapat memecah belah persatuan.
- (3) Peningkatan pengetahuan tentang letak dan wilayah Indonesia serta kekayaan bumi, air serta kekayaan alam.

b) Kesadaran berbangsa dan bernegara, upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan bersama sama dengan Pemerintah Daerah instansi lainnya dengan kegiatan :

(1) Pengenalan Kebhinekaan diarahkan untuk peningkatan pengetahuan tentang keragaman suku, adat istiadat dan bahasa yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati budaya dan adat istiadat.

(2) Perlakuan terhadap lambang negara diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap lambang-lambang negara yang diwujudkan dalam sikap penghormatan terhadap bendera serta pemasangan gambar garuda serta pimpinan negara.

(3) Persatuan dan kesatuan, diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kehidupan gotong royong di lingkungannya.

c) Wawasan Kebangsaan diwujudkan dalam :

(1) Rasa kebangsaan, diarahkan guna menumbuhkan kesatuan tekad serta perasaan masyarakat terhadap kondisi bangsanya untuk menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa bangsa lain diwujudkan dalam kesetiaan masyarakat terhadap pemerintah dan rela berkorban demi menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Paham Kebangsaan, diarahkan guna terbentuknya pemahaman rakyat yang sama terhadap bangsa dan negara yang tercermin dalam pemahaman tentang hak dan kewajiban terhadap pembelaan negara tanpa ada diskriminasi.

(3) Semangat Kebangsaan, diarahkan untuk dapat membentuk sikap mental masyarakat untuk

mendukung setiap kebijaksanaan pemerintah dalam pemerintahan negara.

3) Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan tersedianya tenaga raih dilaksanakan melalui cara persuasif, pragmatif serta komunikatif yang diwujudkan dengan upaya:

- a) Menyusun oerorganisasi perlawanan rakyat yang dapat mendukung penyiapan Daerah Pangkal Perlawanan dan Klasifikasi Daerah.
- b) Melatih tehnik dan taktik serta meningkatkan militansi perlawanan rakyat.
- c) Mengadakan latihan secara terpadu dengan rakyat terlatih sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.
- d) Menyusun protap bersama untuk pelaksanaan keamanan wilayah terpadu.

c. Kondisi Sosial. Pelaksanaan pembinaan teritorial pada bidang kondisi sosial diarahkan pada terciptanya kondisi wilayah yang stabil dan kondusif serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap pengaruh-pengaruh yang dapat melemahkan ketahanan wilayah sehingga diperlukan upaya kongkrit meliputi :

1) Bidang Idiologi. Untuk memantapkan ketahanan masyarakat dalam memahami Pancasila agar timbul kesadaran, kecintaan, dan kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar dan idiologi negara, dengan mengedepankan cara persuasif, serta komunikatif dilakukan dengan malakukan upaya:

- a) Memasyarakatkan Pancasila secara aktif kepada masyarakat melalui komunikasi sosial serta tatap muka.

- b) Memberikan keteladanan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat.
- c) Mencegah timbulnya kelompok-kelompok fanatisme yang berbasiskan keagamaan.
- d) Meningkatkan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam hal pengawasan terhadap munculnya paham/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

2) Bidang Politik. Permasalahan yang menonjol di bidang politik adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengartikan demokrasi dalam kehidupan politik serta tidak memperhatikan rambu-rambu hukum yang berlaku, terutama dalam persaingan antar partai politik serta dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Rendahnya pemahaman ini terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan sebagian kelompok partai politik sehingga menimbulkan kerawanan konflik pada masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut dengan mengedepankan cara persuasif, pragmatif, komunikatif serta forum diskusi maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Memasyarakatkan nilai dan arti paham demokrasi sesuai budaya bangsa yang berlaku di Indonesia kepada masyarakat serta pembelajaran beretika politik dengan memberikan pemahaman penyaluran aspirasi politik melalui jalur yang sudah ditentukan.
- b) Sosialisai serta pemahaman tentang perundang-undangan Otonomi Daerah serta penentuan ketentuan daerah kepada kalangan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Perda.

c) Melaksanakan kerja sama dalam peningkatan pembangunan antar daerah melalui forum studi banding serta forum kerja sama lainnya guna meningkatkan kualitas kemajuan daerah.

3) Bidang Ekonomi. Peningkatan peran pembinaan teritorial pada bidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan swasembada masyarakat dibidang ekonomi dengan mengedepankan cara pragmatif serta komunikatif dilakukan upaya :

a) Mendata berbagai sumber daya alam yang tersedia di daerah.

b) Mempelajari tingkat kemampuan ekonomi masyarakat serta permasalahan dan kerawanan yang dihadapi.

c) Menggerakkan swadaya masyarakat dengan memberdayakan usaha kecil dan menengah serta perkoperasian masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

d) Menyarankan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait untuk pengembangan serta mengajukan pembangunan sentra-sentra ekonomi untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

4) Bidang Sosial Budaya. Peran pembinaan teritorial dalam bidang sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan ikatan persatuan dan kesatuan serta penciptaan kondisi yang kondusif agar dapat mendukung ketahanan wilayah yang handal, untuk itu perlu adanya

peningkatan dengan cara, pragmatif serta komunikatif dilakukan upaya :

a) Peningkatan kesetia kawan sosial serta gotong royong.

(1) Membangkitkan semangat kerja sama dalam berbagai hal antar masyarakat.

(2) Membangkitkan motivasi kerja untuk membangun daerahnya dengan menumbuhkan tepo sliro dan tenggang rasa serta tolong menolong dalam kehidupan masyarakat.

(3) Mendorong dan membantu serta membentuk kelompok kerja antar masyarakat guna meningkatkan kerja sama.

b) Untuk dapat menangkal budaya asing yang berpengaruh buruk terhadap mentalitas serta moral masyarakat dilakukan dengan :

(1) Peningkatan Seni Budaya.

(a) Meningkatkan mutu kesenian daerah yang disesuaikan dengan budaya bangsa guna mencegah masuknya budaya asing yang dapat merusak mentalitas masyarakat.

(b) Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok kesenian masyarakat guna menyalurkan bakat serta seni pada generasi muda.

(c) Mendorong diadakannya kegiatan seni yang dilaksanakan secara terpadu sebagai

TERBATAS

34

sarana untuk meningkatkan ikatan persatuan dan kesatuan.

(2) Peningkatan Olahraga.

(a) Mendorong kegiatan olahraga pada generasi muda untuk menyalurkan bakat serta kegiatan yang dapat bermanfaat.

(b) Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok olahraga sebagai wadah untuk membentuk watak generasi muda yang sportif.

(c) Meningkatkan ikatan persatuan dan kesatuan melalui kegiatan olahraga yang dilaksanakan bersama antar daerah.

(3) Pelestarian adat istiadat.

(a) Memelihara pelestarian adat istiadat dengan mendorong dilaksanakannya peringatan

upacara-upacara yang berkaitan dengan budaya adat.

c) Memelihara nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah agar senantiasa dihormati.

d) Guna terwujudnya lingkungan yang sehat serta dilaksanakan dengan:

(1) Sosialisasi pentingnya program keluarga berencana kepada masyarakat.

(2) Meningkatkan kegiatan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak melalui gerakan pos yandu.

TERBATAS

(3) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

6) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk terwujudnya situasi daerah yang kondusif serta terciptanya stabilitas keamanan serta ketertiban dalam masyarakat dengan mengedepankan cara komunikatif, persuasif serta pragmatif dilakukan upaya :

a) Mengaktifkan pengamanan swakarsa pada masyarakat dengan membentuk Siskamling di desa-desa, membudayakan lapor cepat serta pemberitaan dini.

b) Meningkatkan kemampuan Ratih serta Linmas dengan membantu penyiapan, penyusunan serta pelatihan kemampuan.

c) Meningkatkan kerja sama serta koordinasi dengan aparat lainnya dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan di daerah.

d. Memanfaatkan Kekuatan dan Memberdayakan Peluang.

1) Memanfaatkan situasi politik yang kondusif melalui KKS dengan melakukan upaya-upaya :

a) Lebih banyak berperan aktif berinteraksi dengan masyarakat sehingga mempererat jalinan komunikasi.

b) Menjalin komunikasi dengan kalangan partai politik serta civitas akademi berkaitan penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif

2) Memanfaatkan potensi wilayah menjadi kekuatan untuk menangkal berbagai ancaman dengan persuasif serta komunikatif dilakukan upaya:

- a) Mensosialisasikan kepada masyarakat peran dan fungsi pembinaan teritorial berkaitan dengan penyiapan ketahanan wilayah.
- b) Mengikutsertakan dan mengaktifkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pembinaan wilayah.
- c) Memberikan masukan dan saran dalam pembangunan di pedesaan agar dapat mendukung terbentuknya Rahkalan dan klasifikasi daerah.

3) Memanfaatkan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan teritorial dengan melalui dialog dilakukan upaya:

- a) Mengajukan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan teritorial.
- b) Memberikan saran masukan terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- c) Menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air yang dilaksanakan melalui kegiatan terpadu di setiap strata sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari meliputi pemeliharaan lingkungan hidup, kewaspadaan nasional, pengenalan tanah air.

4) Memanfaatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang sudah terbentuk melalui KKS serta pragmatif dilakukan upaya:

- a) Aktif mengobarkan semangat untuk membangun daerah serta cinta tanah air.

- b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan bhakti TNI, pengawasan serta tanggung jawab sosial.
 - c) Dapat bertindak sebagai panutan masyarakat terutama terhadap sikap prilaku dan ketaatan pada hukum.
- 5) Memanfaatkan satuan kewilayahan yang sudah tergelar melalui komunikasi dilakukan upaya:
- a) Aktif melaksanakan pembinaan teritorial sampai ke pelosok daerah guna menciptakan kondisi wilayah yang mantap serta menumbuhkan desa sebagai pangkal kekuatan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta serta sumber pertumbuhan sosial ekonomi.
 - b) Melaksanakan pembinaan wilayah disesuaikan dengan kondisi, kebiasaan serta tradisi adat di wilayah masyarakat setempat.
 - c) Membagi habis wilayah menjadi tanggung untuk dilaksanakan pembinaan teritorial.
- 6) Memanfaatkan disiplin aparat kewilayahan dengan :
- a) Memberikan tugas yang cukup menantang sehingga dapat mengembangkan daya kreasi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah.
 - b) Memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan pembinaan teritorial dihadapkan dengan terbatasnya sarana dan prasarana.
 - c) Dapat menjadi contoh dalam sikap dan prilaku yang baik kepada masyarakat.

d) Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan wilayah binaan sehingga mampu mengikuti kemajuan dan perkembangan pembangunan.

e. Mengatasi Kelemahan dan Memperkecil Kendala.

1) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial diatasi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan mengalokasikan secara prioritas terhadap wilayah binaan yang kondisinya sangat terbatas serta menjalin mitra karib.

2) Dilaksanakannya pengawasan secara melekat serta evaluasi terhadap anggota terutama unsur Babinsa meliputi penguasaan permasalahan di wilayah binaan serta memberikan penugasan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan batas waktu yang ditentukan sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pemanfaatan waktu serta pelaksanaan tugas, selain dari pada itu teladan hidup yang sederhana dan hidup hemat, tidak boros akan menghindarkan dari tindakan-tindakan melanggar disiplin serta hukum.

3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas Dan Ramil serta Babinsa melalui pelaksanaan penataran ataupun latihan dalam satuan terutama terhadap 5 kemampuan teritorial meliputi:

a) Peningkatan kemampuan temu cepat dan lapor cepat dilaksanakan dengan :

(1) Aktif dan peduli terhadap adanya kejadian-kejadian dengan mendatangi dan mendekati obyek kejadian.

(2) Dapat dengan cepat merespon serta tanggap terhadap adanya issue serta laporan kejadian.

TERBATAS

39

- (3) Aktif mencari informasi sebagai data untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi.
- (4) Mampu melokalisir suatu permasalahan agar tidak menyebar.
- (5) Dapat mengambil tindakan sesuai kemampuan dalam melakukan cegah dini.
- (6) Mempunyai kepedulian untuk segera melaporkan kejadian kepada satuan atas.
- (7) Diberikan melalui latihan serta penataran dalam satuan yang disesuaikan dengan permasalahan dan kemampuan anggota.

b) Kemampuan manajemen teritorial dilaksanakan dengan:

- (1) Mampu membuat perencanaan kegiatan pembinaan wilayah.
- (2) Dapat membagi serta mengatur pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah yang terpadu dengan masyarakat.
- (3) Mempunyai kepedulian terhadap pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan pembinaan wilayah.

c) Kemampuan penguasaan wilayah dilaksanakan dengan:

- (1) Mengenal struktur serta kondisi medan/geografi di wilayah binaan.
- (2) Mempunyai data serta mengenal kondisi masyarakat di wilayah binaan.
- (3) Mengetahui karakteristik, situasi dan kondisi wilayah binaan.
- (4) Dapat mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan timbul.

TERBATAS

TERBATAS

40

- d) Kemampuan perlawanan rakyat dilaksanakan dengan:
 - (1) Mampu membentuk militansi masyarakat terhadap bela negara serta cinta tanah air.
 - (2) Aktif melatih serta sosialisasi kemampuan bela negara kepada masyarakat.
 - (3) Dapat membentuk dan mengorganisir ratih di wilayah.

- e) Kemampuan komunikasi sosial dilaksanakan dengan:
 - (1) Mampu bergaul serta bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat.
 - (2) Dapat bekerja-sama dan berkoordinasi dengan sesama aparat serta instansi terkait.
 - (3) Dapat segera mengenal serta beradaptasi dengan lingkungan.

- d) Aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat meliputi peran dan fungsi pembinaan teritorial sehingga pelaksanaan pembinaan teritorial dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

- e) Melestarikan budaya bangsa sehingga mampu memelihara nilai-nilai kejuangan serta pengaruh budaya asing dengan menumbuhkan keakraban sosial dalam masyarakat.

- g) Aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam serta potensi alam lainnya pemanfatannya memperhatikan pelestarian lingkungan, kondisi alam agar dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu cukup lama.

TERBATAS

BAB VII
P E N U T U P

30. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Pada saat ini penyelenggaraan pembinaan teritorial belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi teritorial yang tidak mendukung sehingga berdampak pada pelaksanaan pembinaan teritorial tidak optimal. Kondisi teritorial yang tidak mendukung dapat diketahui dari indikasi yang ada, sebagai berikut :

- 1) Penentuan prioritas pembangunan hanya cenderung pada pendekatan kesejahteraan saja.
- 2) Belum terbentuknya daerah pangkal perlawanan serta klasifikasi daerah yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan wilayah.
- 3) Belum terinventarisasinya data demografi secara aktual.
- 4) Belum terorganisirnya rakyat terlatih secara baik.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan bela negara yang masih sangat terbatas.
- 6) Masih kurangnya kesadaran terhadap ketentuan serta peraturan hukum oleh masyarakat.

b. Belum maksimalnya penyelenggaraan pembinaan teritorial pada kenyataannya disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat sebagai penghambat meliputi terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas, rendahnya tingkat kesejahteraan aparat teritorial, terbatasnya tingkat profesionalisme aparat teritorial serta masih adanya sikap perilaku dari aparat teritorial yang tidak terpuji dan sikap arogansi pada masyarakat. Namun demikian terdapat faktor-faktor yang bersifat sebagai pendukung yang dapat dimanfaatkan agar pelaksanaan pembinaan teritorial dapat dilaksanakan secara optimal sebagai berikut :

- 1) Masih terjalannya kemanunggalan TNI dengan rakyat yang menjadi modal untuk mengatasi berbagai permasalahan serta gejolak bangsa.
 - 2) Sudah tergelarnya satuan komando kewilayahan secara geografis yang dapat mendukung penyelenggaraan pembinaan teritorial diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Terbentuknya jiwa korsa serta kebersamaan dalam diri aparat teritorial sehingga mampu menumbuhkan motivasi dan semangat dalam menjalankan tugas dihadapkan dengan keterbatasan yang ada.
 - 4) Kemampuan pemerintah saat ini yang mampu menciptakan situasi yang stabil serta kondusif.
 - 5) Adanya respon positif dari beberapa daerah yang telah melaksanakan otonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial.
 - 6) Konsep sistem pertahanan semesta sebagai pedoman pembinaan teritorial dalam memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah.
- c. Memahami pentingnya pembinaan teritorial guna memantapkan ketahanan wilayah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah positif terhadap penyelenggaraan pembinaan teritorial dengan menggunakan metode bhakti TNI dengan pendataan dan KKS , pembinaan ketahanan wilayah dengan persuasif, pragmatif , komunikatif serta komunikasi sosial dengan diskusi , dialog yang dilaksanakan secara terpadu meliputi bidang geografi, demografi dan kondisi sosial guna mewujudkan ketahanan wilayah yang mantap serta penataran , latihan lapangan pada latihan dalam satuan guna meningkatkan kemampuan Aparat Teritorial pada tingkat Dan Ramil serta Babinsa .

31. Saran. Untuk mendukung terselenggaranya pembinaan teritorial serta mengoptimalkan pembinaan teritorial guna memantapkan ketahanan wilayah di darat maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen bangsa tentang hal-hal yang meliputi penyelenggaraan pembinaan teritorial yang berhubungan dengan aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial secara formal maupun non formal.
- b. Dengan perkembangan otonomi daerah saat ini perlu adanya konsep penanganan mekanisme kerja antara TNI dengan pemerintah daerah yang baku meliputi penerapan pelaksanaan pembinaan teritorial guna meningkatkan ketahanan wilayah melalui keputusan bersama antara Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri agar TNI memiliki legalitas hukum dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan teritorial.
- c. Dihadapkan pada tingkat kemajuan perkembangan kondisi saat ini dimana permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial oleh aparat teritorial semakin kompleks maka setiap prajurit TNI khususnya TNI-AD sebelum melaksanakan tugas di lingkungan satuan teritorial seyogyanya diberikan pembekalan kemampuan khusus dalam bidang teritorial melalui pendidikan, pelatihan, penataran maupun pembekalan oleh masing-masing Komandan Satuan teritorial yang bersangkutan.

Bandung, Maret 2011

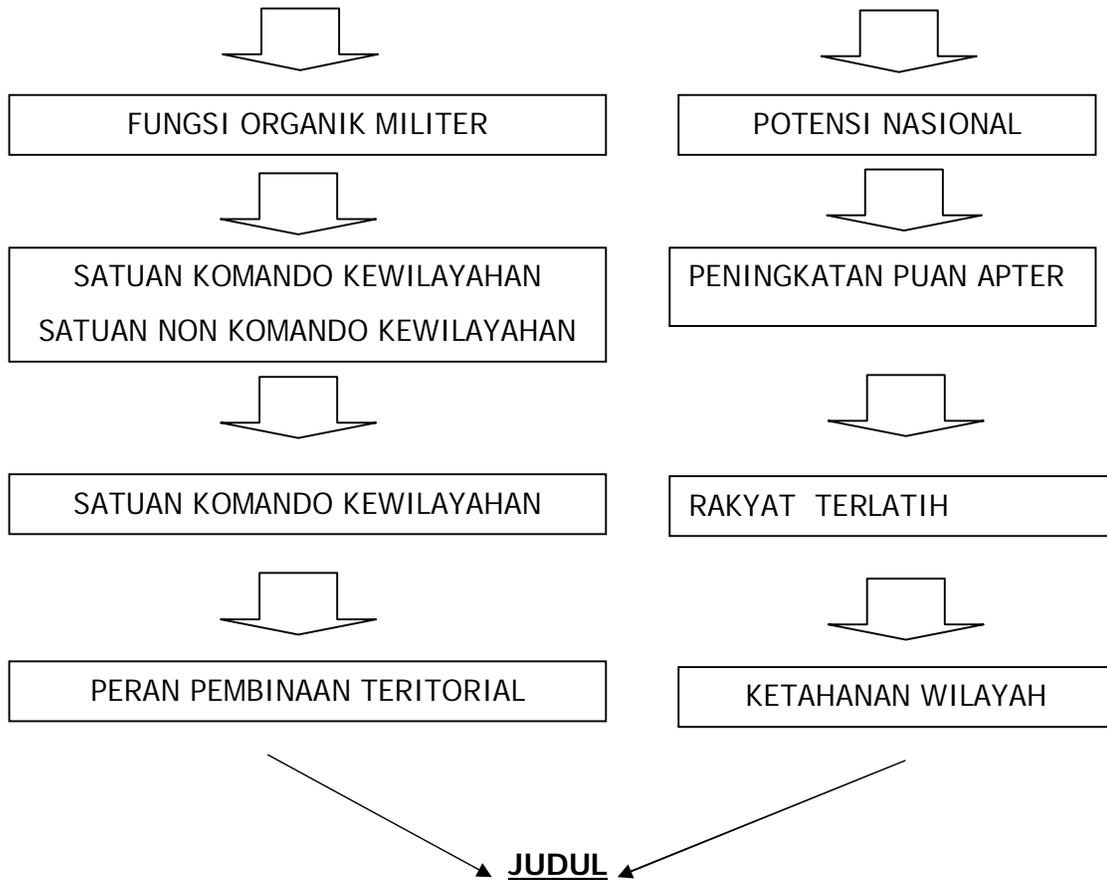
P e n u l i s

Tubagus Abdul Halim

Kapten Inf NRP 633157

PROPOSISI NO. 2

BINTER SEBGAI FUNGSI UTAMA TNI AD DALAM RANGKA
MEMBANTU PEMERINTAH MENYIAPKAN POTENSI NASIONAL
MENJADI KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA ASPEK DARAT SECARA DINI



1. OPTIMALISASI PERAN BINTER GUNA MEMANTAPKAN KETAHANAN WILAYAH

2. OPTIMALISASI PERAN BINTER GUNA MENYIAPKAN KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA.

3. OPTIMALISASI PERAN BINTER DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA